

BAB III

KEBIJAKAN IMF DAN WORLD BANK TERHADAP VENEZUELA

Pada bab ini akan menjelaskan alur sebelum Venezuela keluar dari kedua lembaga itu setelah mengalami dinamika ekonomi dan politik sehingga mempengaruhi situasi Venezuela pada saat itu.

A. Latar Belakang IMF dan World Bank

Pada Modernisasi Venezuela Pada umumnya kondisi negara-negara Amerika Latin yang baru merebut kemerdekaan dari tangan penjajah sangat menyedihkan. Rakyat di negara-negara tersebut belum memiliki pengalaman berpolitik yang memadai. Timbul perbedaan pendapat mengenai bentuk pemerintahan setelah merdeka, apakah republik atau monarki. Akhirnya banyak yang memilih bentuk republik kecuali di Brasil dan juga untuk jangka pendek di Meksiko dan Haiti. Kondisi pendidikan di kalangan rakyat juga memprihatinkan. Rakyat tetap terbelakang dan buta huruf.

Pemerintah yang baru mengatasinya dengan mendirikan sekolah-sekolah baru tetapi, terbentur masalah biaya. Munculnya kelas-kelas baru di masyarakat Amerika Latin juga menjadimasalah tersendiri bagi negara yang masih bercorak feodal dan aristokrat. Kelas yang paling atas adalah kelas tuan tanah besar dan bangsawan gereja yang umumnya adalah orang-orang Spanyol. Kelas menengah yang terdiri dari golongan pedagang dan pemilik pabrik. Golongan rakyat miskin, petani penggarap tanah, pekerja/ buruh kecil yang umumnya adalah orang-orang Indian berada di kelas terendah.

Terdapat pula kelas baru yang terdiri dari orang-orang militer atau caudillo yang merasa paling berjasa dalam perang-perang kemerdekaan. Golongan militer inilah yang berkembang menjadi kelas militer yang merintis sistem kediktatoran militer atau caudillismo di Amerika Latin, sehingga banyak negara-negara Amerika Latin termasuk

Venezuela bermunculan junta-junta militer di pemerintahannya.¹⁰ Venezuela mengalami fase kediktatoran militer mulai tahun 1830.

Sejak runtuhnya Gran Kolombia yang digagas oleh Simon Bolivar tahun 1830, Jose Antonio Paez membuat pemerintahan Republik Venezuela dan mengangkat dirinya menjadi presiden. Jose Antonio Paez melalui partai konservatifnya mendominasi perpolitikan Venezuela antara tahun 1830-1848. Sekitar tahun 1840-an didirikan Partai Liberal Venezuela (Partido Liberal Amarillo) yang mulai menandingi dominasi partai konservatif di Venezuela. Partai Liberal memasuki kancah perpolitikan Venezuela secara nyata ketika Jenderal Jose Tadeo Monagas terpilih sebagai pengganti Paez. Monagas diyakini mempunyai pandangan yang lebih moderat. Jose Tadeo Monagas terpilih dan mendapat dukungan baik dari Partai Liberal maupun Partai Konservatif.

Pemerintahan Jose Tadeo Monagas dijalankan bersama dengan saudaranya Jose Georgio Monagas. Pada tahun 1848, Monagas menyingkirkan Partai Konservatif dari pemerintahan dan mengasingkan Paez. Pemerintahan mereka menjelma menjadi pemerintahan diktator yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan siapa pun. Kantor surat kabar oposisi ditutup dan kongres yang tidak mempunyai kekuatan lagi karena patuh dengan eksekutif yang diwakili oleh Monagas bersaudara. Kebijakan kontroversial juga diambil oleh Monagas Bersaudara. Mereka menghapuskan perbudakan pada tahun 1854 dan mengamandemen konstitusi 1830 pada tahun 1857.

Pada saat yang sama, ekonomi Venezuela memburuk. Hal ini dipicu oleh turunnya komoditas ekspor Venezuela yang mengakibatkan permasalahan fiskal. Hubungan antara Partai Konservatif dan Liberal juga memburuk karena mereka tidak sepakat untuk mengganti presiden Monagas. Perkembangan selanjutnya kaum Konservatif disebut sebagai kaum sentralis dan kaum Liberal disebut dengan kaum federalis

Keterpurukan ekonomi Venezuela dimulai ketika Carlos Andrés Pérez, dilantik sebagai presiden pada 1989. Saat itu, Pérez mewarisi keadaan ekonomi yang carut-marut akibat korupsi dan salah urus kebijakan warisan pemerintahan Luis Herrera Campins. Pérez mengalami masa-masa sulit akibat krisis dan kemudian mengalami jalan buntu dalam mencari kebijakan dan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis tersebut. Keputusan Pérez tersebut kemudian di sambut baik oleh IMF. Untuk memulihkan krisis tersebut, Pérez meminta nasihat dan bantuan keuangan kepada IMF. Setelah meminta nasihat dan bantuan keuangan serta resmi masuk ke dalam IMF, atas saran IMF Pérez kemudian mengumumkan restrukturisasi ekonomi melalui jalan neoliberal. Pada pertengahan Februari 1989, Dampak dari nasihat yang diberikan oleh IMF kepada presiden Venezuela tersebut mulai terasa dalam kebijakan-kebijakannya. Pérez meluncurkan serangkaian kebijakan yang meliputi devaluasi mata uang besar-besaran, peningkatan harga bensin dan transportasi, pemotongan belanja publik, dan pengurangan subsidi atas sejumlah besar bahan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintahan Pérez juga melaksanakan kebijakan privatisasi terhadap sebagian BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi, pelabuhan, minyak, baja dan penerbangan. Pérez juga meluncurkan kebijakan berupa pengurangan tenaga kerja di bidang-bidang industri strategis dan mentransfer kepemilikan kepada investor asing. Sudah dapat dibaca bahwa kebijakan kapitalis semacam itu membawa dampak buruk bagi kehidupan ekonomi Venezuela. Perlahan-lahan akibat-akibatnya mulai dirasakan hampir seluruh rakyat Venezuela.

Dari tahun 1989 sampai 1992, rata-rata penduduk Venezuela kehilangan lebih dari setengah daya belinya yang nyata. Dalam waktu tiga tahun masa kekuasaan Pérez, sekitar 600 ribu orang berpindah ke kota-kota yang mengakibatkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, petani pedesaan dan tukang kebun berkurang sebesar 90 persen. Hal ini kemudian berimbas pada sektor pertanian yang menjadi salah satu komoditas penting bagi kehidupan perdagangan Venezuela.

Penduduk-penduduk kaya yang hanya sekitar 3 % mampu menguasai 76.5 persen lahan pertaniandipedesaan karena kemampuan financial mereka. Sedangkan 42.9 persen pendudukmiskin hanya memiliki lahan seluas satu persen. Sungguh sebuah ironi dari cita-cita Perezyang ingin mengurangi krisis dengan menjalin kerjasama bersama IMF. Makin lama keadaan tersebut tidak mengalami perubahan berarti. Kesulitan hidup yangmenghimpit itu makin lama tak bisa lagi ditanggung terutama oleh kaum miskin Venezuelayang selalu mendapat tekanan dari kebijakan-kebijakan kapitalis tersebut.

Kesabaranrakyat Venezuela pada akhirnya tak bisa lagi dibendung. Ini ditunjukkan denganpemberontakan rakyat pada Februari 1989 yang terkenal dengan nama "Caracazo". Situasi krisis ekonomi menjurus pada depresi berkepanjangan yang dialami rakyat, tingkatkesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara kaya dan miskin, yang kemudian,akumulasi dari kedua hal tersebut memicu terjadinya konflik sosial politik dalam masyarakat.Ironi lain kemudian muncul dalam kehidupan ekonomi Venezuela. Venezuela adalahnegara pengekspor minyak nomor satu di kawasan Amerika Latin dan terbesar kelima didunia. Dari tahun 1958 sampai 1999, pendapatan Venezuela dari sektor minyak inimencaapai US\$250 miliar. Dengan pendatapan sebesar itu, tak heran jika 85 persen dariseluruh penduduk Venezuela yakin bahwa negara mereka adalah salah satu negaraterkaya di dunia. Tetapi kenyataannya mereka semakin miskin. Kontradiksi inimenyebabkan timbulnya frustrasi, kebencian, dan sebagai jalan keluarnya adalah mencaribot pemunahnya dalam waktu singkat.

Kenyataannya 85 persen penduduk Venezuela hidup di bawah garis kemiskinan,dimana dalam sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 51persen. Antara tahun 1975 sampai 2000, jumlah orang miskin bertambah dua kali lipat,dimana jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim bertambah tiga kali lipat.Demikian

juga dalam hal distribusi pendapatan, 20 persen lapisan penduduk terkayamenerima 84 persen pendapatan rumah tangga, sementara 20 persen penduduktermiskin menerima hanya tiga persen pada 1999. Dalam sektor tenaga kerja dan perburuhan pun mengalami hal yang sama. Kebijakan-kebijakan kapitalis tersebut membuat banyak pabrik-pabrik yang ditutup dan tenagakerja hidup dengan melarat. Data mencatat, 50 persen jumlah tenaga kerja bekerjadalam kondisi yang tidak stabil. Sewaktu-waktu mereka bisa terlempar ke dalam sektor informal yang amat tidak stabil. Pada saat yang sama, 20 persen dari seluruh angkatankerja berada dalam situasi menganggur dan hanya 30 persen yang bekerja di sektor formal. Itu pun pendapatan yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi setengahdari kebutuhan untuk makan. Jumlah rata-rata tingkat pengangguran pada tahun 1994sebesar 8.7 persen dan bertambah menjadi 11 persen pada 1998.

Sesuai dengan *press release* yang diterbitkan oleh The IMF Press Release Center (1996) tepat pada tanggal 12 July tahun 1996 IMF menyetujui program *12-month stand-by credit* untuk Venezuela yang setara dengan US\$ 1,4 miliar untuk mendukung program ekonomi pemerintah. Adanya ketidakseimbangan neraca pembayaran akibat turunnya harga minyak dunia secara drastis yang dialami oleh Venezuela membuat mereka akhirnya menerima program IMF pada tahun 1996-1997. Bahkan bukan hanya IMF, bersama dengan World Bank dan Inter-American Development Bank, jaring pengaman social melalui beberapa program ekonomi yang ambisius, serta social dan politik³⁰.

Sebelum program *12-month stand-by credit* diterapkan di Venezuela, pada tanggal 16 Februari 1989 IMF mengimplentasikan kebijakan *Structural Adjustment Program* atau SAP. Reformasi ekonomi yang dijalankan pada masa itu adalah neoliberal dengan menjalankan suku bunga mengambang, kenaikan pajak pelayanan publik, kenaikan upah, tarif impor dihapuskan secara progresif, pengurangan

³⁰The IMF Press Center (1996)

deficit anggaran pendapatan dan belanja negara, pembuatan system kerja yang lebih fleksibel, serta membentuk dekrit eksekutif³¹.

Lebih dari satu dekade, Venezuela memiliki hubungan yang lemah dengan IMF, dan oleh karena itu pemerintah Venezuela tidak ingin IMF banyak terlibat dalam pengawasan rutin terhadap perekonomian Venezuela. Namun Venezuela didapati telah melanggar komitmen pengawasan IMF yang akhirnya dapat mengusir Venezuela dari IMF. Keputusan nantinya juga akan banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat sebagai pemegang saham terbesar dari IMF. IMF memperkirakan untuk memberikan bantuan sebesar \$ 30 miliar dalam setahun yang kemungkinan akan membutuhkan akses ke sumber daya IMF di atas batas pinjaman normal. Mengingat krisis dan situasi yang sulit di Venezuela, program dan kebijakan IMF ini menimbulkan kekhawatiran³².

Pada awalnya sejak tahun 1976 dimana Venezuela mendirikan perusahaan minyak negara yang bernama Venezuela Petroleus de Venezuela atau PDVSA, Venezuela memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat sehingga ia pun tidak segan untuk menjalin hubungan dengan IMF serta memprivatisasi lembaga negaranya. Namun kebijakan yang diusung pada masa itu pada akhirnya membuat kekacauan seperti terjadinya kemiskinan ketika terdapat kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dan gas³³.

Venezuela telah melonggarkan hubungannya dengan IMF dan Bank Dunia sejak Chavez mengambil alih kantor pada 1999. Baru-baru ini Venezuela melunasi hutangnya kepada Bank Dunia lima tahun lebih cepat dari jadwal. Dengan demikian, ia menghemat \$ 8m (£ 3,99 juta) dan menghapus semua utangnya ke IMF segera setelah Chavez

³¹Ferdiansyah (2011)

³²Nelson (2018)

³³Razali (2014)

terpilih³⁴. Hal ini sebagai upaya pengurangan ketergantungan Venezuela terhadap lembaga pinjaman multilateral.

Namun bukan hanya IMF dan Bank Dunia yang turut menyumbangkan kebijakannya terhadap Venezuela, Amerika Serikat juga turut menstransfer kontrol Venezuela melalui beberapa perusahaan yang lebih banyak mengambil kebijakan tentang oil boom, perusahaan itu seperti ConocoPhillips, Chevron dan ExxonMobil, BP Inggris, Statoil dan Total Prancis Norwegia. Berkat kepemimpinan Hugo Chavez pula melalui nasionalisasi beberapa lembaga negara pada akhirnya dapat diambil alih sebagai berakhirnya era kebijakan yang didoktrin oleh Washington serta pengembalian sumber dayanya pada kepemilikannya sendiri.

1. Latar Belakang IMF

International monetary Fund atau yang lebih akrab dengan sebutan IMF merupakan sebuah lembaga Ekonomi Internasional yang didirikan pada tahun 1945 pada tanggal 26 Desember melalui *Multilateral Treaty Agreement* atas usulan dari John Maynard Keynes yang berasal dari Inggris dan Harry Dexter White asal Amerika Serikat yang pada masa awal pembentukannya bertujuan untuk membantu pembangunan Eropa oleh Amerika Serikat atau lebih sering dikenal dengan *Marshal Plan*. Secara umum IMF memiliki wewenang kepada negara anggota untuk menekan Negara agar patuh terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh IMF guna memperbaiki perekonomian disetiap Negara yang menjadi anggota, terlebih ada dua hal yang mejadi daya tarik Negara Negara agar bergabung dengan mereka adalah (1) *Universality* artinya adalah semua negara memiliki hak dan kedudukan dalam Organisasi tersebut, (2) Adanya perlakuan yang berbeda dari masing masing negara oleh IMF dari segi kebijakan agar sesuai dengan wilayah atau kondisi negara atau lebih mudah disebut dengan *Regional Norm* oleh sebab itu

³⁴Tran (2007)

maka negara yang bergabung dengan IMF akan memiliki peluang yang sama sesuai dengan konteks wilayah dan kondisi negara.

Latar Belakang lahirnya IMF tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Great Depression pada tahun 1929-1930-an³⁵ yang mengakibatkan hancurnya perekonomian Global saat itu. Setelah terjadinya peristiwa tersebut maka dibentuklah 2 lembaga yang dipercaya akan memperbaiki perekonomian Dunia pasca Great Depression yaitu International Monetary Fund(IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD atau lebih dikenal sebagai World Bank yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947³⁶. Yang diikuti oleh 187 negara IMF mulai memberikan pinjaman kepada negara negara dengan jumlah besar dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan perang dan mengembangkan moneter sehingga terwujudnya negara-negara yang sejahtera. Tujuan awal berdirinya IMF adalah untuk membangun perekonomian di kawasan eropa akibat perang dunia I dan II, namun tujuan tersebut berubah menjadi memberikan pinjaman pinjaman kepada negara negara yang membutuhkan modal untuk membangun perekonomian dalam bentuk aliran dana yang nantinya akan dialokasikan kepada Infrastruktur ataupun suprastruktur sebuah negara.

Postwar merupakan sistem moneter yang bertujuan memfasilitasi pertukaran Internasional dalam barang dan jasa dengan menyediakan mata uang Convertible didalam pasar terbuka / Free market serta Legal³⁷. IMF sejauh ini telah memiliki 188 negara anggota dan IMF menjadi Agensi spesial dalam Struktur PBB³⁸. Dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan seberapa besar berperan dalam Struktural IMF

³⁵ Cyrillus Harinowo, Op.Cit.,hlm.74

³⁶ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada,1994

³⁷ Simmons (2001:310 – 312)

³⁸ IMF (2012)

sebagai contoh adalah Amerika Serikat yang memiliki 421,965 suara (16.76 dari jumlah total), sedangkan Tuvalu hanya 759 sebesar 0,03% dari jumlah total kalkulasi suara 5,502 (IMF, 2012). IMF sendiri terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki peran dan tugas pada masing-masing bidang. Pertama, *board of governor* yang terdiri dari perwakilan tiap negara anggota IMF³⁹. Kedua adalah *International Monetary and Financial Committee* yang memiliki fungsi sebagai badan yang bertugas untuk menjadi penasihat dari *board of governor*.

Ketiga, sebagai puncak kedudukan atau pemegang kekuasaan yang badan ini melegitimasi power yang ia miliki kepada executive board dalam rangka melakukan berbagai kebijakan, seperti menetapkan peningkatan kuota, menentukan *Special Drawing Right* (SDR), menyetujui keanggotaan baru IMF, mewajibkan penarikan dana tertentu kepada setiap anggota IMF, dan mengamandemen *Articles of Agreements* dan *By-Laws*⁴⁰. Dan terakhir, *board of governor* juga berwenang untuk memilih *executive directors* yang merepresentasikan *Articles of Agreements* IMF⁴¹. Setiap setahun sekali, Bank Dunia dan IMF mengadakan *Annual Meetings* yang membahas mengenai efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga di dalam IMF pada saat mengatasi problematika⁴². Di dalam pertemuan tersebut, *board of governor* mengambil keputusan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, terkait dengan isu ekonomi dan keuangan internasional⁴³.

IMF hanya berwenang pada berbagai persoalan yang menyangkut makro ekonomi, dengan menggunakan beberapa metode, mulai dari kebijakan dan manajemen keuangan, *public finance*, kebijakan moneter, *central banking*,

³⁹ IMF (2007)

⁴⁰ Anonim (2007)

⁴¹ IMF (2007).

⁴² IMF (2007)

⁴³ IMF (2007).

sistem keuangan, *foreign exchange market* beserta kebijakan di dalamnya, *macro economic policy formulation and management*, serta *financial statistic*⁴⁴.

Latar Belakang lahirnya IMF tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Great Depression pada tahun 1929-1930-an⁴⁵ yang mengakibatkan hancurnya perekonomian Global saat itu. Setelah terjadinya peristiwa tersebut maka dibentuklah 2 lembaga yang dipercaya akan memperbaiki perekonomian Dunia pasca Great Depression yaitu International Monetary Fund(IMF), International Bank for Reconstruction and Development(IBRD atau lebih dikenal sebagai World Bank yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947⁴⁶. Yang diikuti oleh 187 negara IMF mulai memberikan pinjaman kepada negara negara dengan jumlah besar dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan perang dan mengembangkan moneter sehingga terwujudnya negara – negara yang sejahtera. Tujuan awal berdirinya IMF adalah untuk membangun perekonomian di kawasan eropa akibat perang dunia I dan II, namun tujuan tersebut berubah menjadi memberikan pinjaman pinjaman kepada negara negara yang membutuhkan modal untuk membangun perekonomian dalam bentuk aliran dana yang nantinya akan dialokasikan kepada Infrastruktur ataupun suprastruktur sebuah negara.

1.1. Tujuan Berdirinya IMF

Sebuah Organisasi Internasional (fungsional Khusus) mesti memiliki tujuan paling dasar (filsafat). IMF tentu saja memiliki tujuan-tujuan, beberapa tujuan tersebut dijelaskan kemudian diringkas dari Pasal1 Anggaran Dasar IMF sebagaimana berikut:

⁴⁴ Anonim (2001).

⁴⁵ Cyrillus Harinowo, Op.Cit., hlm.74

⁴⁶ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada, 1994

- Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kolaborasi tentang masalah moneter internasional.
- Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan tingkat kesempatan kerja maupun pendapatan riil yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.
- Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib di antara anggota, dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam rangka menghormati transaksi berjalan antara anggota dan untuk menghapuskan pembatasan valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.
- Untuk memberikan kepercayaan diri bagi para anggotanya dengan menyediakan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumberdaya secara memadai, sehingga mamapu memberi kesempatan kepada anggota untuk mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang menghambat kemakmuran nasional atau internasional.
- Sejalan dengan hal di atas, untuk memperpendek waktu dan mengurangi tingkat ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional para anggota. Semua kebijakan dan keputusan IMF dibuat berdasarkan tujuan-tujuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

1.2. Sumber Dana (Kas) IMF

Sumber pendanaan IMF terutama berasal dari pembayaran iuran kuota (atau modal) dari negara-negara

anggota ketika mereka bergabung dengan IMF, atau melalui tinjauan berkala dari kenaikan kuota. Negara membayar 25 persen dari pembayaran iuran kuota mereka dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights—SDR) atau dalam bentuk mata uang utama, seperti dolar A.S. atau yen Jepang. IMF dapat meminta sisa 75 persen pembayaran kuota dalam bentuk mata uang negara anggota sendiri, yang dapat disediakan untuk pinjaman sesuai kebutuhan. Kuota tidak hanya menentukan jumlah pembayaran iuran sebuah negara, tetapi juga kekuasaan hak pilihnya; jumlah pembiayaan/pinjaman yang dapat diterima dari IMF, dan bagiannya dalam alokasi SDR.

Kuota dimaksudkan untuk mencerminkan secara luas ukuran relatif anggota dalam perekonomian dunia: semakin besar output ekonomi negara, dan juga semakin besar dan lebih bervariasi perdagangannya, maka kuotanya cenderung semakin tinggi. Amerika Serikat, sebagai perekonomian terbesar di dunia, menyumbang kuota paling banyak pada IMF yaitu 17,6 persen dari total kuota; Republik Palau terkecil di dunia, dengan menyumbang sebesar 0,001 persen.

1.3. Pelayanan Terhadap Anggota IMF

Beberapa pelayanan yang dapat dilakukan terhadap anggota IMF antara lain seperti meninjau dan memonitor perkembangan keuangan dan ekonomi global dan nasional dan menasihatkan anggota tentang kebijakan ekonomimereka. IMF juga memberikan pinjaman mata uang kertas kepada mereka untuk mendukung penyesuaian dankebijakan reformasi yang ditetapkan untuk mengoreksi masalah neraca pembayaran dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, IMF juga menawarkan berbagai macam bantuan teknis, juga pelatihan bagi para pejabat bank pemerintah dan sentral, di dalam bidang keahliannya.

Selain tiga point di atas, IMF juga memberikan pinjaman valuta asing kepada negara yang mengalami masalah neraca pembayaran. Pinjaman IMF mengharuskan

penyesuaian yang mesti dilakukan negara peminjam agar pembelanjaan sesuai dengan pendapatannya untuk mengoreksi masalah neraca pembayarannya. Selain itu pemberian pinjaman IMF juga dimaksudkan untuk mendukung kebijakan, termasuk reformasi struktural, yang akan meningkatkan posisi neraca pembayaran suatu negara dan prospek pertumbuhan berkesinambungan.

Setiap negara anggota dapat berhutang kepada IMF untuk pembiayaan jika memiliki kebutuhan neraca pembayaran yaitu, jika negara tersebut memerlukan pinjaman resmi supaya dapat melakukan pembayaran eksternal dan mempertahankan tingkat cadangan yang tepat tanpa melakukan langkah langkah yang menghambat (mengorbankan-membahayakan) kemakmuran nasional atau internasional. Langkah-langkah “membahayakan” itu bisa termasuk pembatasan perdagangan dan pembayaran, penekanan yang tajam akan permintaan dalam ekonomi dalam negeri, atau depresiasi yang tajam akan mata uang domestik. Bagi IMF, pinjaman perlu dilakukan oleh negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran, yang bisa saja membuat kebijakan ekonomi domestik dengan “membahayakan” kemakmuran nasional.

1.4. Fasilitas Pinjaman IMF Terhadap Anggota

Pinjaman Siaga adalah inti kebijakan pinjaman IMF. Skema ini memberikan kepastian kepada negara anggota bahwa bantuan pinjaman siaga digunakan sampai sejumlah tertentu, biasanya selama 12–18 bulan, untuk mengatasi masalah neraca pembayaran jangka pendek.

Fasilitas Pendanaan yang Lebih Panjang. Dukungan IMF bagi anggotanya berdasarkan Fasilitas Pendanaan Diperpanjang memberikan kepastian bahwa sebuah negara anggota bisa menarik sampai sejumlah tertentu, biasanya selama tiga sampai empat tahun, untuk membantu negara itu

mengatasi masalah ekonomi struktural yang menyebabkan kelemahan serius dalam neraca pembayarannya.

Fasilitas Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan adalah fasilitas berbunga rendah untuk membantu negara anggota termiskin menghadapi masalah neraca pembayaran yang terlalu lama. Biaya bagi para peminjam disubsidi melalui hasil dari penjualan emas milik IMF di masa lalu, bersama dengan pinjaman dan dana bantuan yang disediakan kepada IMF untuk tujuan tersebut oleh anggota-anggotanya.

Fasilitas Cadangan Tambahan, menyediakan pembiayaan jangka pendek tambahan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran yang terkecuali karena hilangnya kepercayaan pasar yang mendadak dan mengganggu yang tercermin dalam arus modal keluar.

Kredit Kontinjen (Contingent Credit Lines—CCL). Untuk memudahkan anggota melaksanakan kebijakan ekonomi kuat agar memperoleh pembiayaan IMF jangka pendek ketika menghadapi hilangnya kepercayaan pasar yang mendadak dan mengganggu, biasanya diakibatkan dari “penularan” kesulitan di negara lain.

Bantuan Darurat. Diperkenalkan di tahun 1962 untuk membantu anggota mengatasi masalah neraca pembayaran yang timbul dari bencana alam yang mendadak dan tidak disangka, bentuk bantuan ini diperpanjang di tahun 1995 untuk mencakup situasi tertentu di mana anggota telah keluar dari konflik militer, untuk membantu pembangunan kapasitas administratif dan institusional.

1.5. Pelatihan dan Bantuan Teknis

Selain memberikan nasihat serta pemberian pinjaman bagi negara-negara yang menghadapi krisis ekonomi, IMF juga berbagi pengalaman keahliannya dengan negara anggota secara teratur dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis di berbagai bidang, seperti perbankan, kebijakan valuta asing dan moneter, kebijakan dan administrasi pajak, serta pembuatan statistik resmi. Pelatihan dan bantuan teknis

bertujuan untuk membantu memperkuat rancangan dan implementasi kebijakan ekonomi anggota, termasuk memperkuat ketrampilan dalam lembaga yang bersangkutan seperti kementerian keuangan dan bank sentral. Bantuan teknis melengkapi nasihat kebijakan IMF dan bantuan keuangan bagi negara anggota dengan menggunakan sekitar 20 persen dari biaya administrasi IMF.

IMF mulai menyediakan bantuan teknis di pertengahan tahun 1960-an ketika banyak negara merdeka mencari bantuan dalam mendirikan bank sentral dan kementerian keuangan mereka. Kebijakan besar IMF terkait dengan bantuan teknis adalah yang dilakukan pada awal tahun 1990-an, ketika negara di Eropa tengah dan bagian timur dan bekas Uni Soviet memulai pergantian mereka dari sistem ekonomi yang berdasarkan perencanaan terpusat ke sistem berdasarkan pasar (Dari sistem sosialis/komunis, ke sistem pasar/kapitalis). Pada dekade ini, IMF telah meningkatkan pemberian bantuan teknisnya sebagai bagian usaha untuk memperkuat arsitektur sistem keuangan internasional. IMF menolong sistem keuangan negara-negara berkembang, meningkatkan data ekonomi dan keuangan, memperkuat sistem hukum dan pajak mereka, serta meningkatkan regulasi pengawasan perbankan. IMF juga telah memberikan nasihat operasional banyak bagi negara yang harus mendirikan kembali lembaga pemerintahan (institusi negara) pasca-konflik, kerusuhan sipil berat dan peperangan. IMF menyediakan bantuan teknis dan pelatihan terutama di empat bidang:

- a. Memperkuat sektor moneter dan keuangan melalui saran pengaturan sistem perbankan, pengawasan, dan restrukturisasi, manajemen dan pengoperasian sistem valuta asing, sistem kliring dan penyelesaian untuk pembayaran, serta struktur dan pembangunan bank sentral
- b. Mendukung manajemen dan kebijakan fiskal yang kuat melalui nasihat administrasi dan kebijakan bea dan cukai, formulasi anggaran, manajemen

- perbelanjaan, rancangan jaringan pengamanan sosial, dan manajemen hutang internal dan eksternal.
- c. Menyusun, mengelola, dan diseminasi data statistik dan meningkatkan kualitas data.
 - d. Penulisan konsep dan peninjauan peraturan perundang undangan ekonomi-keuangan.

1.6. Pengawasan terhadap Anggota

Pasal-pasal Perjanjian IMF menjadi acuan dan digunakan untuk mengawasi sistem moneter internasional, termasuk dengan melakukan pengawasan yang ketat yaitu pengawasan atas kebijakan nilai tukar negara anggotanya. Di bawah Pasal-pasal Perjanjian ini, setiap negara anggota berjanji melakukan kolaborasi dengan IMF dalam usahanya untuk memastikan pengaturan nilai tukar yang tertib dan mempromosikan sistem nilai tukar yang stabil. Lebih khususnya, negara anggota setuju untuk mengarahkan kebijakan kepada tujuan pertumbuhan ekonomi secara tertib dengan stabilitas harga yang sesuai, bersama dengan kondisi keuangan dan ekonomi yang mendasar dan untuk menghindari manipulasi nilai tukar bagi keuntungan kompetitif yang tidak adil. Di samping itu, setiap negara bersedia memberikan informasi kepada IMF yang diperlukan untuk pengawasan efektifnya. Negara anggota telah menyetujui bahwa pengawasan IMF terhadap setiap kebijakan nilai tukar anggota harus dilaksanakan di dalam kerangka ekonomi umum dan strategi kebijakan ekonomi anggota tersebut.

Pemonitoran ekonomi secara teratur dan pemberian nasihat kebijakan yang terkait, di mana pengawasan IMF terlibat, dapat membantu memperingatkan adanya bahaya sedini mungkin dan memudahkan para anggota bertindak tepat waktu supaya dapat menghindari kesulitan. IMF melaksanakan pengawasannya dalam tiga cara:

Pengawasan Negara, dalam bentuk konsultasi komprehensif teratur tahunan dengan negara anggota secara individu tentang kebijakan-kebijakan ekonomi mereka, dengan

diskusi interim seperlunya. Tim ahli ekonomi IMF mengunjungi negara tersebut untuk mengumpulkan data keuangan dan ekonomi dan berdiskusi dengan pejabat bank sentral dan pemerintah tentang kebijakan ekonomi negara tersebut dalam konteks perkembangan terakhir. Staf IMF meninjau kebijakan makro ekonomi negara tersebut (fiskal, moneter, dan nilai tukar), menilai kesehatan sistem keuangannya, dan memeriksa hal-hal kebijakan industri, sosial, perburuhan, pemerintahan, lingkungan dan lainnya yang bisa mempengaruhi kinerja dan kebijakan makro ekonomi. Tim staf kemudian menyusun laporan tentang penemuannya, disetujui oleh manajemen, diberikan kepada Dewan Eksekutif, yang membahas analisis staf. Dan pandangan Dewan, disimpulkan oleh Ketuanya, dikirimkan ke pemerintah negara tersebut. Dengan cara ini, pandangan masyarakat global dan pelajaran dari pengalaman internasional dikerahkan untuk memanfaatkan kebijakan negara yang bersangkutan.

Pengawasan Global, menyangkut peninjauan kecenderungan dan perkembangan ekonomi global oleh Dewan Eksekutif IMF. Pengkajian utama semacam ini adalah berdasarkan pada laporan Ramalan Ekonomi Dunia (World Economic Outlook) disiapkan oleh staf IMF, biasanya dua kali setahun, sebelum pertemuan Panitia Moneter dan Keuangan Internasional yang diadakan dua kali setahun. Laporan ini diterbitkan dengan lengkap sebelum pertemuan IMFC, bersama dengan ringkasan Ketua tentang diskusi Dewan Eksekutif. Elemen lain dalam pengawasan global IMF adalah biasanya diskusi tahunan Dewan tentang isu-isu pembangunan, prospek, dan kebijakan dalam pasar modal internasional, laporan staf tentang hal-hal ini juga diterbitkan. Dewan Eksekutif juga mengadakan diskusi informal yang lebih sering tentang perkembangan pasar dan ekonomi dunia.

Pengawasan Regional, di mana IMF memeriksa kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian regional. Ini termasuk, misalnya, diskusi Dewan tentang perkembangan di Uni Eropa, Uni Moneter dan Ekonomi Afrika Barat,

Komunitas Moneter dan Ekonomi Afrika Tengah, dan Uni Mata Uang Karibia Bagian Timur. Manajemen dan staf IMF juga berpartisipasi dalam diskusi pengawasan kelompok negara semacam itu seperti G-7 (Kelompok Tujuh negara industri utama) dan forum APEC (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik)

1.7. Transparansi dan Akuntabilitas IMF

Transparansi, pada bagian negara anggota IMF dan institusi IMF, membantu menyokong kinerja ekonomi lebih baik dalam berbagai cara. Keterbukaan lebih luas oleh negara anggota mendorong analisis yang lebih baik dan lebih luas atas kebijakan mereka terhadap publik; meningkatkan akuntabilitas pembuat kebijakan dan kredibilitas kebijakan; dan menginformasikan pasar keuangan sehingga mereka dapat berfungsi dengan lebih teratur dan efisien. Keterbukaan dan penjelasan yang lebih baik oleh IMF tentang kebijakannya sendiri, dan nasihat yang diberikannya kepada anggota, memberikan dinamisasi perdebatan kebijakan yang lebih jelas dan memahami secara lebih baik akan peran dan operasi IMF. Dengan menunjukkan nasihatnya bagi pemeriksaan dan perdebatan publik, IMF dapat juga membantu menaikkan tingkatan analisisnya. Sejak pertengahan tahun 1990-an, IMF telah mengembangkan dengan luas volume informasi yang dipublikasikan oleh IMF. Akuntabilitas IMF bagi pemerintah anggotanya dan kepada masyarakat luas telah ditingkatkan di tahun-tahun terakhir melalui evaluasi eksternal kebijakan dan kegiatannya oleh para ahli di luar organisasi.

2. Sejarah World Bank

Gagasan tentang perlunya keberadaan sebuah institusi internasional dalam bidang keuangan sebenarnya sudah mulai dirintis sejak Perang Dunia II bergulir. Dalam kaitannya dengan dengan hal tersebut diatas, mendekati musim panas 1944, diadakanlah Konferensi Moneter dan keuangan PBB (United Nations Monetary and Financial Conferences) yang dihadiri oleh 730 orang policy-makers dan para pakar

keuangan internasional yang berkedudukan sebagai delegasi dari 45 negara. Konferensi tersebut mengambil tempat di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, sehingga kelak dikenal dengan sebutan Konferensi Bretton Woods. Tujuan dari Konferensi Bretton Woods adalah untuk menulis kembali aturan system keuangan internasional sehingga dampak Perang Dunia II tidak akan mengulangi perdagangan dan kebijakan moneter yang buruk pasca PD I. Konferensi Bretton Woods ini diakhiri dengan keberhasilan meletakkan dasar-dasar bagi pendirian dua lembaga keuangan internasional sekaligus, yakni Bank Dunia dan IMF. Kedua lembaga tersebutsering juga disebut sebagai Lembaga Bretton Woods atau Bretton Woods Institution. Secara implisit, dalam organisasi dan struktur lembaga Bretton Woods itu ditetapkan prinsip-prinsip tentang bagaimana perdagangan dan pembayaran internasional harus dilakukan.

Hal inilah yang sebenarnya menjadi substansi dasar dari Bretton Woods System, yakni dimana kedua lembaga tersebut dirancang untuk mengekspresikan prinsip-prinsip dimaksud serta memberikan keabsahannya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam sistem Bretton Woods atau Basic Principles of Bretton Woods System seperti yang tersebut diatas adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa perubahan nilai tukar adalah suatu masalah yang menjadi kepedulian internasional dan stabilitas pertukaran uang yang paling baik, bisa dicapai melalui suatu sistem nilai tukar yang ditetapkan untuk sementara waktu tetapi mungkin bervariasi dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan perubahan fundamental yang terjadi dalam ekonomi internasional.
2. Bahwa harus ada beberapa tambahan atas cadangan mata uang dan emas nasional agar supaya negara-negara tidak dipaksa untuk memenuhi defisit neraca pembayarannya dalam jangka pendek dengan mengganggu penyesuaian atas ketenagakerjaan dan pendapatan domestic.

3. Bahwa kepentingan untuk keselarasan politis dan kesejahteraan ekonomi bersama-sama disajikan oleh suatu sistem perdagangan multilateral yang tak terkekang dan mata uang yang dapat diubah.
4. Bahwa suatu ketidakseimbangan neraca pembayaran perlu dilihat dari dua sisi dan koreksinya menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi negara-negara yang surplus maupun Negara yang mengalami defisit.
5. Bahwa kerjasama moneter internasional itu terbaik dilakukan melalui suatu lembaga internasional dengan kekuasaan-kekuasaan dan fungsifungsi yang telah ditetapkan.
6. Bahwa gangguan moneter itu seringkali bersifat tidak moneter murni sehingga suatu agen moneter internasional harus bekerjasama dengan para agen lainnya dimana masing-masing agen tersebut bertanggungjawab untuk berbagai permasalahan seperti masalah stabilisasi ketenagakerjaan atau masalah liberalisasi perdagangan dunia.

Bahwa tingkat investasi internasional yang tinggi dan berkelanjutan adalah cukup penting artinya bagi stabilitas ekonomi internasional dan bahwa aliran investasi internasional privat mungkin dapat difasilitasi dan ditingkatkan dengan penciptaan sebuah Bank Investasi Internasional. Dalam rangka itu, organisasi internasional yang akan dibentuk harus dapat memberikan pinjaman lunak (Soft Loans) kepada negara-negara berkembang yang sedang berada dalam upaya atau proses pembangunan dan cukup berkepentingan atas dana pinjaman tersebut. Adapun pinjaman yang akan diberikan adalah bersifat jangka panjang dengan persyaratannya dan tanpa bunga. Atas dasar hal tersebut diatas, maka pada tahun 1958, Monroney mengusulkan kepada senat Amerika Serikat untuk membentuk IDA dalam kerangka Bank Dunia. Usul tersebut ternyata disetujui oleh senat dan disetujui pula oleh Negara-negara anggota Bank Dunia. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, maka para direktur eksekutif diminta untuk segera membuat draft perjanjian guna menetapkan IDA.

Akhirnya IDA berhasil didirikan dan anggaran dasar dari IDA mulai berlaku sejak tanggal 15 september 1960.

World Bank merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 melalui konferensi yang berlangsung pada 1 Juli – 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Secara teknis dan structural, Bank Dunia termasuk kedalam salah satu Badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank Dunia (World Bank Group), dimana Bank Dunia hanya terdiri dari dua lembaga, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD/International Bank for Reconstruction and Development) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA/International Development Association). Berbeda halnya dengan Grup Bank Dunia yang mencakup IBRD dan IDA, serta ditambah lagi dengan tiga institusi lainnya, yaitu: International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Secara umum, tujuan Bank Dunia adalah mengurangi kemiskinan. Namun selain tujuan umum tersebut, perlu pula kita melihat tujuan yang tertuang dalam dokumen konstitusi dasar dari dua institusi Bank Dunia, yaitu IBRD dan IDA.

2.1. Latar Belakang dan Tujuan Bank Dunia

Dokumen yang dikenal dengan Articles of Agreement yang merupakan landasan hukum, menjadi konstitusi dasar dari Bank Dunia. Dalam pasal 1 anggaran dasar IBRD disebutkan tujuan pendiriannya adalah untuk hal-hal sebagaimana berikut:

1. Membantu pembangunan dan perbaikan di wilayah Negara anggota dengan menyediakan pinjaman maupun penanaman modal untuk kepentingan produksi.

2. Mendorong penanaman modal asing dengan cara pemberian jaminan atau dengan berpartisipasi langsung dalam pemberian pinjaman.
3. Mendorong pertumbuhan neraca jangka panjang dalam perdagangan internasional dan mempertahankan keseimbangan dalam neraca pembayaran.
4. Mengatur pinjaman-pinjaman agar lebih bermanfaat dan untuk proyek-proyek yang lebih diperlukan.
5. Menghubungkan kegiatan umum yang mempunyai dampak terhadap penanaman.
6. Modal atau perdagangan internasional dalam wilayah Negara anggota. Sedangkan menurut pasal 1 anggaran dasar IDA, bahwa tujuannya adalah untuk membantu pembangunan ekonomi, menaikkan produktifitas dan menaikkan kehidupan Negara-negara berkembang, terutama Negara-negara anggota, khususnya menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan dengan persyaratan yang lebih ringan dan luwes serta kurang membawa pengaruh terhadap neraca pembayaran jika dibandingkan dengan pinjaman bisa IDA harus melanjutkan tujuan pembangunan IBRD.

Disamping itu IDA hanya sebagai suplemen dari tugas IBRD sehingga IDA merupakan sub-ordinat dari IBRD. Pada akhirnya, tugas Bank Dunia adalah untuk membimbing misi pembangunan yang panjang dan sangat fundamental dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup rakyat di dunia. Dalam rangka mencapai tujuannya tersebut, maka Bank Dunia haruslah mengambil posisi sebagai sebuah lembaga keuangan yang tetap giat memungkinkan mobilisasi dana dan dalam masyarakat pemberi donor untuk membantu Negara berkembang.

2.2. Sumber Dana World Bank

Sumber dana utama bagi IBRD adalah iuran Negara anggota sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar IBRD tentang *authorized capital* (modal dasar) dan saham dengan harga sebesar 100.000 dolar amerika. Untuk modal dasar tersebut Negara anggota asli harus membayar saham dengan batas minimum seperti yang tercantum dalam anggaran dasar IBRD, sedangkan bagi Negara anggota lain banyaknya bagian saham ditentukan oleh keputusan IBRD dengan memperhatikan kemampuan Negara anggota yang bersangkutan. Diluar dana modal tersebut, IBRD memiliki dana cadangan yang dimulai sejak tahun 1964.

Ketika IBRD memutuskan bahwa pendapatan dari kegiatan meminjamkan dan hasil 1% dari biaya yang ditarik tiap tahun dari pinjaman yang dikeluarkan akan didepositkan pada cadangan umum. Cadangan ini disebut juga sebagai cadangan suplemen. Cadangan ini pula lah yang digunakan sebagai hibah pada IDA. IBRD pun memiliki dana pinjaman, yakni dana yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan para Negara anggotanya berdasarkan anggaran dasar. Mula-mula IBRD meminjam pada pasar modal Amerika Serikat, tetapi kemudian berkurang. IBRD meminjam dengan jalan menjual obligasi, misalnya pada Jerman, Swiss, Jepang, OPEC dan lain-lain. Dalam memberikan pinjaman pada Negara-negara berkembang, IBRD mempunyai kebijaksanaan yang disebut “Interest Subsidy Fund” yang merupakan bagian dari apa yang disebut dengan *intermediate financing facility*, yang ditentukan oleh direktur eksekutif pada tanggal 29 Juli 1975 dan mulai efektif berlaku pada 23 Desember 1975.59 Kebijakan ini sering juga disebut juga dengan “third window” karena IBRD memberikan pinjaman dengan bunga tinggi (*harder*) dibandingkan dengan pinjaman IDA yang lebih lunak (*softer*) jika dibandingkan dengan bunga yang bisa ditentukan IBRD dalam pinjamannya.

Interest Subsidy Fund ini dibiayai oleh iuran sukarela anggota dari Swiss Sementara itu, IDA mengumpulkan

dananya melalui iuran Negara anggotanya. Adapun Negara anggota IDA digolongkan menjadi dua, yaitu golongan pertama, yang terdiri dari Negara-negara kaya. Golongan I harus membayar penuh iurannya dalam bentuk emas maupun dalam bentuk mata uang. Sedangkan golongan kedua, terdiri dari Negara-negara berkembang. Golongan II hanya membayar 10% dari iurannya dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk mata uang. Sisanya sebanyak 90% dibayar dalam bentuk mata uang negaranya dan hanya dapat dipergunakan untuk dipinjamkan bila ada persetujuan dari Negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembalian kredit yang berasal dari IDA cukup panjang dan tidak dikenai bunga, tidak seperti halnya IBRD yang meminjam dari pasar modal.

2.3. Jenis Bantuan Pinjaman World Bank

Bank Dunia merupakan institusi keuangan internasional yang arus utama pergerakannya berada dalam wilayah pemberian bantuan berupa pinjaman. Sejak tahun 1968, ketika presiden Bank Dunia dijabat oleh R. Mc. Namara, dirinya sangat tertarik meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal.⁶² Jika kita mengaitkannya dalam sektor kesehatan, Bank Dunia sejak tahun 2002 menaruh perhatian khusus dalam bidang ini⁶³. Adapun selain bantuan pinjaman, bantuan teknis pun diterbitkan Bank Dunia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dunia⁶⁴. Dalam implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Bank Dunia, biasanya Negara peminjam mengajukan permohonan proposal bantuan yang berisi usulan proyek-proyek. Disisi lain, ada prioritas tersendiri dari Bank Dunia yang dapat terlihat dari strategi sektor, Negara, dan regional.

The Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) disiapkan oleh Pemerintah dengan inisiatif dari Bank Dunia, yang menggambarkan target jangka pendek pengurangan angka kemiskinan Negara terkait. Disisi lain, Strategi Bantuan Bank Dunia atau Bank's Country Assistance Strategy (CAS), dibuat oleh Bank Dunia untuk menggambarkan rencana

aktifitasnya di negara-negara tertentu selama lebih dari 3-5 tahun. Wujud dari PRSP dan CAS adalah kompromi kepentingan dari Bank Dunia termasuk Negara donor didalamnya dengan kepentingan nasional sebuah Negara peminjam. Pada titik inilah, Negara pemberi pinjaman yang tergabung dalam Dewan Direktur Bank Dunia harus memiliki jaminan bahwa kepentingan mereka dapat tercapai melalui kerja-kerja Bank Dunia, sehingga apa yang terjadi di negara-negara peminjam (recipient) adalah hasil dari interaksi berbagai kepentingan ini. Meskipun Bank Dunia selalu menyatakan bahwa semua proyek yang didukungnya di sebuah negara selalu diminta oleh pemerintah yang bersangkutan, namun pada kenyataannya pemerintah negara peminjam seringkali tidak memiliki pengaruh yang cukup atas penyusunan dokumen kunci strategis ini.

Begitu pula dengan pengaruh masyarakat sipil pada substansi dokumendokumen kebijakan seperti PRSP dan CAS masih sangat terbatas. Padahal implementasi kebijakan strategis Bank Dunia, melalui riset dan analisa, investasi proyek, serta pinjaman untuk perubahan kebijakan, sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah serta agenda dari donor lain.⁶⁵ Adapun berbagai jenis bantuan pinjaman Bank Dunia secara formal, terdiri atas sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) Perjanjian ini diadakan antara dua pihak debitur (peminjam) dengan pihak kreditur (Bank Dunia) dimana Bank Dunia telah menyetujui pinjamannya.
2. Perjanjian jaminan (Guarantee Agreement) Perjanjian ini diadakan oleh Bank Dunia dengan Negara anggota dimana Negara anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari Bank Dunia.
3. Perjanjian Proyek (Project Agreement)
4. Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dimana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam.

5. Perjanjian Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement)
6. Perjanjian ini diadakan apabila Negara meminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain, misalnya pemerintah pusat meminjamkan dana pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan proyek yang telah dibiayai oleh Bank Dunia.
7. Surat Penjelasan (Supplementary Letters)
8. Surat Penjelasan ini kadang-kadang diperlukan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian diatas, sehingga karena sifatnya merupakan penjelasan pelengkap bagi perjanjian.
9. Pengaturan Kontrak Tambahan (Additional Contractual Agreement)
10. Kadang-kadang dibutuhkan suatu pengaturan tambahan yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah khusus, misalnya pengaturan pinjaman, seperti pembuatan akte notaris dan cara pembayaran.

Dalam hal tertentu, mungkin adanya suatu kontrak yang sangat kompleks antara pemerintah dan pihak swasta sebagai pelaksana proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bank Dunia disini akan ikut mengawasi, walaupun bukan sebagai pihak dalam kontrak yang demikian, namun Bank Dunia berkepentingan dalam hubungannya dengan pinjaman yang diberikan. Bank Dunia perlu memberikan persetujuan atas kontrak yang sedemikian ini.

B. Paket Kebijakan Ekonomi dan Politik IMF dan World Bank terhadap Venezuela

Krisis Ekonomi yang melanda negara berkembang merupakan salahsatu cara untuk bisa menjadi jalan masuk bagi institusi Internasional seperti IMF dan World Bank agar dapat menguasai sumberdaya alam serta mengendalikan politik dalam negeri. Ekonomi suatu saat dapat menjadi obyek politik namun

kebanyakan adalah sebaliknya, yaitu politiklah yang menjadi alat Ekonomi. Pola yang sering terjadi di beberapa negara dalam upaya untuk mengontrol pemimpin dunia, dengan cara menciptakan Krisis dalam negeri agar terciptanya kekacauan yang memicu krisis ekonomi. Atau lebih mudah disebut sebagai *order of chaos*. Menciptakan kekacauan untuk meloloskan kepentingan.

1. Kebijakan World Bank di Venezuela

World Bank atau Bank Dunia mengalami berbagai evolusi peran dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Bank Dunia turut membantu Negara berkembang dalam bidang infrastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan industrialisasi. Sedangkan pada tahun 1980-an ia memiliki kebijakan berupa menyediakan bantuan reformasi kebijakan untuk pertumbuhan. Terjadinya degradasi lingkungan membuat World Bank turut berperan dalam bidang lingkungan, juga dalam bidang ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sector swasta, serta turut meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan⁴⁷.

World Bank Group dengan salah satu anak lembaganya yang bernama *International Bank for Reconstruction and Development* atau disingkat IBRD merupakan lembaga yang berfokus kepada pemberian bantuan pengembangan Negara-negara berkembang, tujuan ini dilaksanakan sejak Perang Dunia Kedua yang disebabkan oleh keinginan Amerika untuk memiliki kendali langsung atas dana rekonstruksi yang dipindah ke Marshall Plan⁴⁸. Gebner (2014) dalam Muhumed & Gas (2016) juga menjelaskan bahwa secara finansial World Bank menyediakan bantuan kepada negara berkembang yang berupa *low-interest loans, zero to low-interest credits and grants*. Bukan hanya kepada para peminjam, fasilitas yang

⁴⁷ Miller-Adams 1999 dalam Muhumed & Gas (2016)

⁴⁸ Gebner (2014) dalam Muhumed & Gas (2016)

diberikan oleh World Bank juga diberikan untuk para “pendonor” yaitu berupa penawaran *trust-fundpartnership*. Dalam segi yang lain, World Bank juga menyediakan penelitian dan analisis, saran kebijakan dan dukungan teknis⁴⁹.

Program jangka panjang juga telah disusun oleh World Bank hingga tahun 2030 yang bertujuan untuk (1) menghentikan kemiskinan ekstrem dengan cara mengurangi persentase masyarakat dengan pendapatan kurang dari \$ 1,9 per hari dengan penurunan sebanyak tiga persen hingga maksimal, (2) mempromosikan kemakmuran bersama dengan memupuk pertumbuhan pendapatan di bawah 40 persen untuk semua negara⁵⁰.

Keberadaan Bank Dunia sebagai lembaga ekonomi internasional yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang ternyata mendapatkan kritik yang datang dari para ekonom, professional, serta para pemimpin serta warga dari berbagai Negara, hal ini terutama datang dari berbagai Negara berkembang. Hal yang dikritik adalah mengenai keberadaan dan tujuan Bank Dunia, apakah untuk membantu Negara berkembang atau hanya untuk melindungi kepentingan orang kaya, juga mengenai bagaimana transparansi dan efektivitas mereka dalam pengambilan keputusan, serta keberpihakan dari kebijakan World Bank yang juga menyangkut keuangan dan teknis.

Bukan hanya ekonomi, kebijakan yang diusung oleh World Bank juga mengandung unsur politik yang cukup kental. Amerika Serikat sebagai pemegang saham sebesar 17 persen juga sebagai anggota G7 dari World Bank menjadi satu-satunya negara pemegang hak veto atas keputusan yang bersifat besar⁵¹, siapapun yang menjadi presiden World Bank akan tergantung pada siapa yang ditunjuk dan dikehendaki oleh Presiden AS. Sementara itu negara-negara yang menjadi peminjam terutama negara-negara berkembang hanya

⁴⁹ World Bank (2016a) dalam Muhumed & Gas (2016)

⁵⁰ World Bank (2016a) dalam Muhumed & Gas (2016)

⁵¹ Stiglitz (2007) dalam Muhumed & Gas (2016)

memiliki 38 persen suara dalam yang merupakan suara minoritas, selain itu Presiden World Bank tidak pernah berasal dari negara peminjam.

Obvious Loan atau pinjaman ganjil, merupakan pinjaman yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dalam kebijakannya pinjaman ini memiliki syarat bahwa yang menjalankan pembangunan infrastruktur ini adalah perusahaan milik Amerika Serikat, hal ini tentu saja membuat dana yang mengalir akan kembali ke Amerika Serikat sebagai pemegang proyek⁵².

2. Kebijakan IMF di Negara Venezuela

Menurut Laporan Tahunan IMF (2018), International Monetary Fund merupakan sebuah organisasi global yang didirikan untuk meningkatkan kesehatan ekonomi dunia. IMF memiliki tujuan utama diantaranya untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar dan memberikan fasilitas perluasan serta pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang. IMF membantu permasalahan neraca pembayaran yang dihadapi oleh setiap negara anggota yang terwakili dalam Dewan Eksekutif dengan cara memberikan pinjaman yang bersifat sementara selain juga melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas.

IMF memiliki tiga peran utama yaitu (1) memberikan saran kepada negara anggota, (2) menyediakan pembiayaan, dan (3) menawarkan bantuan teknis dan pelatihan. Saran yang diberikan berupa kebijakan-kebijakan yang perlu diambil agar setiap negara anggota dapat mencapai stabilitas makro, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat mengentaskan kemiskinan. Selain membantu mengatasi masalah neraca pembayaran, IMF juga membantu mengatasi kekuarangan valuta asing yang terjadi pada saat pembayaran eksternal yang terjadi pada negara anggota melampaui penerimaan mata uang asing. Sementara itu bantuan teknis dan pelatihan akan diberikan jika diminta oleh negara anggota, yang

⁵²Elsayed 2016 dalam Muhumed & Gas (2016)

bertujuan untuk membangun dan memperkuat keahlian serta kelembagaan negara anggota dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan perekonomian yang kuat⁵³.

Terjadinya ketidakseimbangan global membuat ekonomi global menjadi lebih rentan terhadap pembalikan arus modal yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat beresiko menimbulkan proteksionisme, dengan efek merugikan terhadap perdagangan dan pertumbuhan, oleh karenanya, IMF mendukung adanya stabilitas ekonomi makro global yang mana merupakan barang publik internasional (international public good) yang memerlukan komitmen dari semua negara. Bukan hanya itu, kebijakan IMF haruslah memiliki komponen yang teknokratik⁵⁴ karena dalam setiap krisis keuangan dibutuhkan sikap yang logis dari setiap negara. Keberadaan IMF untuk memperbaiki ketidakadilan dalam neraca pembayaran suatu negara membuat IMF ingin agar kebijakan yang terpakai dapat mempengaruhi beberapa variabel ekonomi.

Perlindungan stabilitas ekonomi makro secara global dilakukan oleh IMF dengan menyediakan asuransi untuk membantu pencegahan terjadinya krisis, bukan hanya itu IMF juga memberikan pembiayaan jika terjadi krisis, serta memberikan intensif bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang dapat menanggulangi krisis agar tidak sering terjadi dan masih dapat dikendalikan.

Pagu kredit yang juga digunakan atas dasar pencadangan atau dana siaga ini diberikan kepada negara-negara dengan fundamental ekonomi yang kuat. Dalam setahun terakhir di tahun 2018, IMF memperbarui produk pagu kredit guna pencegahan krisis miliknya, yaitu *Flexible Credit Line* (FCL) dan *Precautionary and Liquidity Line* (PLL). Pembaharuan ini adalah untuk membuat proses kualifikasi menjadi lebih terprediksi dan transparan. FCL diberikan kepada negara dengan fundamental kuat dan

⁵³ (IMF, Laporan Tahunan IMF 2018: Tinjauan Umum, 2018)

⁵⁴ Breen, 2008

kebijakan yang juga kuat, sementara PLL diberikan kepada negara dengan fundamental kuat dan memiliki kerentanan yang terbatas.

Dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan serta inklusi ekonomi IMF dalam Laporan Tahunannya di tahun 2018 memiliki kebijakan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perluasan akses pendidikan yang berkualitas
- b. Perluasan akses kesehatan bagi masyarakat miskin
- c. Investasi untuk pembangunan infrastruktur
- d. Upaya pendalaman inklusi keuangan dalam menjangkau yang paling rentan
- e. Pemberian insentif bagi peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan.
- f. *Revenue collection* atau pengumpulan penerimaan dan belanja yang tepat sasaran
- g. Merancang dengan baik pajak penghasilan progresif dan pajak kekayaan tertentu.

Selain dari segi kesenjangan, IMF bekerjasama dengan Bank Dunia juga mengenalkan Penilaian Kebijakan Perubahan Iklim atau *Climate Change Policy Assessments*. Kebijakan ini memberikan peilaian menyeluruh mengenai mitigasi iklim. Perhatian IMF pada mitigasi iklim didasarkan pada penelitian yang dilakukan IMF pada World Economic Outlook, Oktober 2017 lalu yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengurangi PDB per kapita sekitar 1,5 persen—dan kerugian tersebut akan bertahan setidaknya selama tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa biaya ekonomi akibat kenaikan suhu akan menjadi substansial terutama bagi negara berpendapatan rendah seperti negara berkembang yang menghasilkan sangat sedikit emisi gas rumah kaca. Sedangkan dari segi kebersihan ekonomi setiap negara, IMF turut memperbarui kebijakan mengenai tata kelola korupsi yang akan ditangani jika hal tersebut memberikan dampak ekonomi makro yang signifikan. Kebijakan tersebut berfokus pada sisi *demand* dan *supply*.

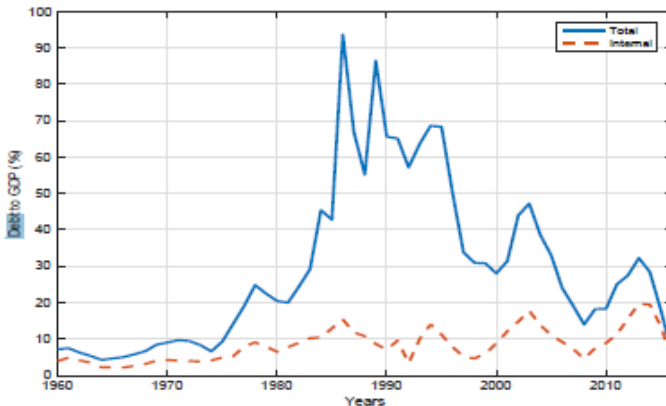
Program IMF sering mencerminkan beberapa pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang meliputi keputusan politik, teknokratis, dan birokratis. Meskipun IMF jelas memiliki komponen teknokratik dan birokrasi, mereka terlalu ditekankan, meninggalkan celah dalam literatur untuk penjelasan tentang determinan politik kebijakan IMF. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi bervariasi di berbagai negara, saya membahas kepentingan utama, aktor, dan agen yang mengendalikan kebijakan IMF.

3. Dinamika Ekonomi saat menjadi anggota IMF dan World Bank

Venezuela menjadi anggota dari lembaga keuangan raksasa tersebut tidak atas kehendak dari rakyat Venezuela, melainkan sebuah persyaratan agar dapat diakui kemerdekaan oleh Negara kolonial, maka keikutsertaan tersebut bukanlah sebuah langkah politik Internasional yang direncanakan dengan sangat matang, melainkan karena hampir semua negara negara jajahan bangsa Eropa dimerdekakan namun dengan syarat harus menjadi anggota IMF dan World Bank. Kebijakan yang dibuat oleh kedua lembaga ini memiliki peran berbeda namun bermotif sama.

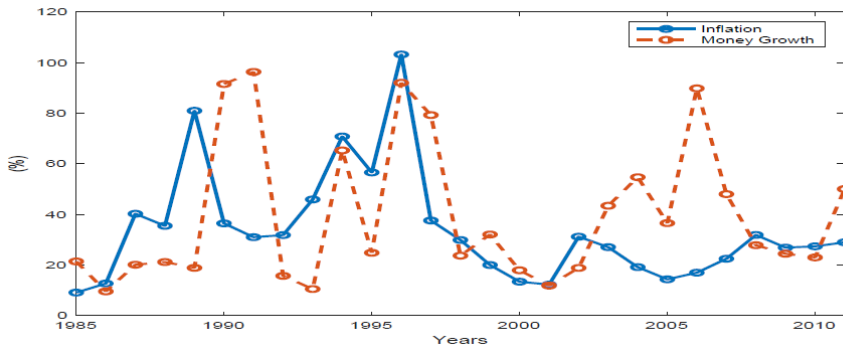
Selain motivasi politik, World Bank juga memiliki motivasi ekonomi untuk mengontrol segala aktifitas ekonomi bangsa Venezuela melalui Sistem Bank Central Venezuela. Tidak banyak diketahui dan di muat di media bahwa Bank Central memiliki aturan yang diterapkan hampir diseluruh Bank di dunia bahwa lembaga tersebut adalah Independen, yang artinya pemerintah tidak dapat ikut campur dalam pembuatan kebijakan keuangan seperti peredaran uang, suku bunga dan lainnya. Selain itu juga sistem perbankan yang digunakan Bank Central yang Independen dari pemerintahan namun dipenden kepada World Bank juga berperan dalam meningkatkan rasio hutang negara Venezuela. Negara tersebut tidak seharusnya menjadi miskin bahkan memiliki hutang yang harus dibayar oleh rakyat melalui Pajak. Venezuela memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak namun

memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah, sehingga sangat tidak masuk akal jika mereka harus menanggung beban hutang negara tersebut, bahkan jumlah hutang lebih banyak dari jumlah uang yang beredar di Venezuela.



Gambar 3. 1 Grafik Rasio Public Debt dan GDP

Tabel diatas adalah grafik yang menunjukkan rasio antara GDP dan Public Debt Venezuela, terlihat bahwa angka mulai signifikan sekitar tahun 1980-1999 dikarenakan terjadi gejolak yang luar biasa untuk menuntut keadilan dan perubahan di Venezuela.



Gambar 3. 2 Grafik Pertumbuhan Inflasi di Venezuela

Data diatas merupakan grafik dari pertumbuhan Inflasi yang terjadi sejak tahun 1985 hingga 2010, terlihat bahwa sejak 1985 kenaikan sudah mulai terjadi akibat tidak baiknya sistem tata kelola negara dan termasuk juga banyaknya korupsi yang terjadi sehingga ekonomi tidak terkelola dengan baik.